

Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016)

Kristy Harly

Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: harly_yahoo.com

Mayar Afriyenti

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: afriyenti_mayar@yahoo.co.id

Abstract

The good performance of the local government can be seen from the level of community welfare that increases from year to year, but the conditions found in reality show a declining performance but the welfare of society continues to increase. This led to the blurring of government performance in the eyes of society. Because of it, This research was conducted to analyze the performance of local government from two perspectives that is about financial information and non financial information to see whether or not the performance of government. This type of research is qualitative with population and research sample refers to social situations that include places, actors and activities around local taxes and levies. Data obtained by spreading questionnaires and conducting interviews to respondents. The data analysis technique used refers to the value for money and the effectiveness level of the respondent's answer. As a result financially the performance of the local government of Solok is very good but in terms of non-financial, government performance in the eyes of society still have not received a good appreciation for the lack of effectiveness of the implementation of government

Keyword: financial, non financial, performance, government

1. Pendahuluan

Kinerja merupakan suatu hasil yang kita peroleh dalam rangka pencapaian sasaran yang telah kita tetapkan, di ukur dan dilakukan untuk menciptakan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Dalam mencapai tujuan ini maka kinerja mesti di ukur dengan seksama agar dapat dievaluasi dan berdaya guna. Untuk mencapai maksud di ini maka dibutuhkan informasi - informasi yang relevan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Informasi yang akan digunakan dalam pengukuran ini yaitu terbagi atas dua bagian yakni informasi finansial dan informasi non finansial.

Informasi finansial merupakan pengukuran kinerja dengan didasari pada analisis varian yang terjadi akibat adanya perbedaan capaian dari apa yang dianggarkan dengan apa yang terjadi dilapangan. Sedangkan informasi non finansial mengukur kinerja sektor publik dengan mengembangkan pengukuran kedalam empat perspektif yang terbagung dalam konsep *Balanced Scorecard*.

Hasil dari pengukuran kinerja yang dilakukan baik dari sisi informasi finansial

maupun non finansial nantinya akan menghasilkan penilaian apakah pemerintahan tersebut baik atau buruk dalam pelaksanaan pemerintahannya melayani masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Kinerja dikatakan baik saat memenuhi prinsip pemerintahan yang baik, yang di atur perundang undangan dan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk membuktikan hal tersebut maka sebagai ilustrasi dapat kita lihat capaian kinerja agenda pembangunan Kota Solok tahun 2013 – 2015. Melihat capaian kinerja agenda pembangunan Kota Solok dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dapat dikatakan bahwa beberapa bagian dari kinerja pemerintahannya belum memenuhi prinsip dalam mencapai pemerintahan yang baik. Prinsip yang kurang dalam pencapaian ini yaitu efektivitas dari pelaksanaan agenda

yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Turunnya efektivitas dinyatakan sebagai tidak terealisasinya program yang ditargetkan dalam kurun waktu satu periode masa kerja. Seperti pada agenda pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja yang disertai dengan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat karena kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Namun terkait dengan hal itu, dinilai dari tingkat kesejahteraan masyarakat pada Kota Solok yang dapat di nilai dengan beberapa aspek kesejahteraan, hasil menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat pada Kota Solok terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Turunnya tingkat kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan yang masih dalam kondisi normal, harapan hidup yang cenderung meningkat dan pembangunan manusia mengarah ke yang lebih baik menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan pada kesejahteraan masyarakat, sehingga ini tidak sejalan dengan turunnya capaian kinerja pemerintah. Jika kita nilai dari prinsip pemerintahan yang baik maka kinerja pemerintah daerah mengalami kendala pada beberapa bagian dikinerjanya namun untuk melihat tercapainya tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan maka kinerja yang telah terlaksana telah memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dengan adanya layanan yang baik sehingga terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk memutuskan kinerja pemerintah ini baik atau buruk maka kita perlu menilai secara seksama dari aspek finansial maupun non finansial agar dapat menciptakan keputusan yang tepat dalam menilai dan mengukur kinerja pemerintahan. Aspek finansial menggambarkan secara nyata bagaimana pengelolaan pendapatan yang diserap dari masyarakat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik sedangkan aspek non finansial menggambarkan bagaimana pelayanan yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.

Karena tujuan utama adanya pemerintah adalah memberikan pelayanan yang prima dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat maka ini mesti kita bahas seperti apa kinerja yang ideal dan baik dalam pemerintah baik dari sudut pandang finansial maupun non finansial, maka peneliti ingin membahas hal ini dalam rangka menjawab masalah bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Kota Solok jika di pandang dari informasi finansial dan informasi non-finansial tahun 2014 - 2016

2. Telah Literatur

2.1 *Value for Money* sebagai Penilaian Kinerja Sektor Publik

1) Rasio Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2009) ekonomi adalah perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis adalah praktik pembelian dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik yang dimungkinkan (*spendingless*). Pengertian ekonomis sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Dengan demikian pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomis, karena kedua-duanya menghendaki penghapusan dan penurunan biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran biaya dan realisasi biaya.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi biaya memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran biaya memperoleh pendapatan}}$$

Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio ekonomis berarti kinerja pemerintah semakin baik. Adapun kriteria ekonomis penilaian kinerja keuangan yang diberikan oleh Mahsun (2006) dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis Berimbang
Lebih dari 100%	Tidak Ekonomis

Sumber : Mohamad Mahsun, 2006

2) Rasio Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok bahasan *value for money*. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, rumusnya adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tapi dalam bentuk relatif karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

- Meningkatkan *output* pada *input* yang sama
- Meningkatkan *output* pada proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan *input*.
- Menurunkan *input* pada tingkatan *output* yang sama
- Menurunkan *input* dalam porsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan *output*.

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900.-327 tahun 1996 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

3) Rasio Efektivitas

Mardiasmo (2009) menyatakan Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Rumus untuk menentukan ini yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat berikut ini :

Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 tahun 1996

b. Balanced Scorecard (BSC)

Menurut Mulyadi (2005) Balanced Scorecard merupakan pengukuran kinerja secara berimbang melalui dua perspektif yaitu keuangan dengan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern.

Dalam konsep BSC terdapat beberapa perspektif, Menurut Kaplan dan Norton (1996) perspektif ini yaitu :

1) Perspektif Keuangan

Menggunakan tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI karena tolak ukur ini secara umum menjelaskan keuntungan organisasi. Tolak ukur yang di design dengan baik dapat memberikan gambaran yang akurat untuk keberhasilan organisasi

2) Perspektif Pelanggan

Dalam pemerintahan, perspektif pelanggan dapat dinyatakan dalam kepuasan masyarakat sebagai penikmat pelayanan. Menurut Tjiptono (2000) kepuasan pelanggan terhadap jasa yang diperoleh pada umumnya dapat dievaluasi dengan menggunakan atribut dalam menentukan kualitas jasa, yaitu :

- a) Bukti langsung (*tangible*), secara umum meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi.
- b) Keandalan (*reability*), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang menjanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
- c) Daya tanggap (*responsiveness*) mencakup keinginan para karyawan untuk membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d) Jaminan atau kepastian (*insurance*) mencakup pengetahuan, kemampuan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki karyawan, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.
- e) Empati (*emphaty*) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi dengan baik, perhatian, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan.

3) Perspektif Efisiensi Proses internal

Menurut Kaplan dan Norton,(1996) Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan baik manajer maupun karyawan untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi pelanggan dan juga para pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu:

a) Proses inovasi

Dalam proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan, proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas serta ketepatan waktu dari proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi

biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan. Secara garis besar proses inovasi dapat dibagi menjadi dua yaitu: Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan, Pengukuran terhadap proses pengembangan produk.

b) Proses Operasi

Pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis, lebih menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan.

c) Pelayanan Purna Jual

Tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah dilakukannya pengukuran terhadap pelayanan purna jual kepada pelanggan. Pengukuran ini menjadi bagian yang cukup penting dalam proses bisnis internal, karena pelayanan purna jual ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan.

4) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Kaplan (1996) mengungkapkan betapa pentingnya suatu organisasi bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan karena dengan meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif diatas dan tujuan perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga perspektif Balanced Scorecard.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi yaitu penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat serta fakta fakta dan sifat populasi tertentu. Populasi dan sampel dalam penelitian yaitu menyangkut kepada situasi sosial. Menurut Hamid (2010) situasi sosial yang dimaksudkan disini adalah Tempat (*Place*) dalam hal ini yaitu Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok. Pelaku (*Actors*) yaitu masyarakat yang menikmati pelayanan dan aparatur pemerintah daerah Kota Solok. Aktivitas (*Activity*) adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah

Kota Solok Terbatas pada Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi serta Pelayanan Administrasi oleh Pemerintah. Selanjutnya pada aparatur pemerintah terbatas pada aktivitas satu SKPD

Jenis data yang digunakan yaitu Kuantitatif adalah data keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 hingga tahun 2016 dan data Kualitatif mengenai deskripsi responden secara umum, sejarah dan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Solok serta tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terbatas pada satu SKPD. Selain itu juga pada masyarakat yang menikmati operasional aparatur pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan observasi nonpartisipan. Analisis data terbagi atas dua yaitu

a. Penilaian Kinerja Aspek Finansial

Teknik analisis data yang dapat digunakan untuk menilai kinerja aspek finansial yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penilaian kinerja keuangan digunakan konsep *Value for Money* dengan tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

b. Penilaian Kinerja Aspek Non-Finansial

Penilaian kinerja non-finansial melalui perspektif kepuasan Masyarakat dengan variabel bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati akan dinilai dari pernyataan positif (+) dan negatif (-) dengan empat pilihan yaitu sangat setuju dan setuju dinyatakan sebagai pernyataan yang positif dan tidak setuju beserta sangat tidak setuju dinyatakan sebagai pernyataan negative (Ratih, 2011). Menurut Wardika, (2004) pengukuran kinerja masing-masing variabel dapat dilakukan dengan dasar adanya pernyataan positif (ya) dan negatif (tidak).

Untuk mengetahui kinerja aspek non finansial dilakukan perhitungan efektivitas kinerja dengan rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dimana :

Realisasi = Masyarakat atau sampel yang menjawab pernyataan positif

Target = Jumlah atau total masyarakat sampel

Pengukuran tingkat efektivitas non-keuangan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri Republik Indonesia tahun 1991 sebagai berikut :

- 1) Rasio efektif dibawah 40 % artinya sangat tidak efektif
- 2) Rasio efektivitas antara 40 – 59,99 % artinya tidak efektif
- 3) Rasio efektivitas antara 60-79,99 % artinya cukup efektif
- 4) Rasio efektivitas diatas 80 % artinya sangat efektif

4. Hasil dan Pembahasan

Usia produktif lebih dominan pada Pemerintah Daerah Kota Solok. Pendidikan yang secara umum pada tingkatan perguruan tinggi menjelaskan bahwa kualitas masyarakat Kota Solok cukup tinggi dan hal ini dapat meningkatkan berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah yang berhasil adalah pemerintahan yang masyarakatnya secara aktif ikut dalam memantau dan mengatur pemerintahannya karena pada dasarnya demokrasi kita ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Secara finansial kinerja Pemerintah Daerah Kota Solok dinyatakan sangat baik. Tingkat ekonomis yang kecil menjelaskan bahwa pemerintah mampu untuk meminimalisir biaya yang dianggarkan dengan biaya yang benar benar terjadi. Penghematan ini berarti pemerintah mampu mengelola biaya dengan sangat baik sehingga biaya yang terbuang dengan cuma cuma serta tidak diperlukan dapat dimilimalisir dan ditekan. Kinerja seperti ini akan mampu membangun daerah dengan lebih baik.

Efisiensi diterapkan dengan begitu baik. Palsanya efisiensi merupakan bagaimana cara pemerintah untuk memanfaatkan keterbatasan anggaran untuk mendatangkan pendapatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan ini berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Solok. Hal seperti ini dikategorikan sebagai kinerja yang sukses menuju kesejahteraan masyarakat.

Keefektivan pun tergolong baik untuk Pemintah Kota Solok. Walau ada penurunan, namun ini masih dalam kategori wajar dan normal. Dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kota Solok dari aspek finansial dikategorikan baik.

Aspek non finansial merupakan penilaian kinerja melalui beberapa perspektif

yang diantaranya yaitu perspektif pelanggan, perspektif efisiensi proses internal dan pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan survey kepada masyarakat terkait dengan perspektif pelanggan, kebanyakan dari hasil penelitian ini merujuk pada ketidak efektifan pemerintah memberikan kepuasan kepada masyarakat. Ketidakpuasan ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap keinginan masyarakat dan tidak tanggapnya pemerintah dengan keluhan masyarakat. Hal ini termasuk kepada kurang baiknya kinerja Pemerintah Daerah Kota Solok.

Jika di lihat dari perspektif efisiensi proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan yang di survey melalui pegawai pemerintahan maka keseluruhan hasilnya menyatakan tingkat keefektifan yang tinggi. Walau begitu masih ada ketidak efektifan dan tidak maksimalnya pencapaian pemerintah dari segi aparatur pemerintahannya. Jika kita pandang secara umum maka untuk aspek non finansial kinerja pemerintah masih kurang baik. Karena pada dasarnya adanya pemerintah ditujukan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk membandingkan pencapaian pemerintah di sisi finansial dan non finansial, berikut data yang dapat kita perhatikan yaitu :

Tabel 4.18 Ringkasan Kinerja Pemerintah Kota Solok

No	Aspek Finansial	Aspek Non Finansial
1	Ekonomis Peningkatan realisasi biaya terjadi pada tahun 2014 hingga 2015. Peningkatan mencapai 100% dari sebelumnya. Hal ini juga berefek pada peningkatan pendapatan. Rasio ke ekonomisan meningkat drastis hingga mendekati 80% dari sebelumnya 41% namun ini masih di bawah 100% sehingga masih tergolong	Perspektif kepuasan Pelanggan Di lihat dari respon masyarakat terhadap pemerintahan, bukti langsung dirata ratakan pada kategori cukup efektif dengan kisaran 70%, keandalan pemerintah dimata masyarakat dihargai keefektivannya pada kisaran 70%, daya tanggap pemerintah pada keluhan masyarakat dengan kisaran keefektivan 30%, jaminan dengan capaian 70% dan empati pada kisaran keefektivan 50%.

	ekonomis dan kinerja di katakan baik	Secara menyeluruh respon masyarakat pada pemerintah dinyatakan tidak efektif sehingga kinerja dinyatakan cukup buruk
2	Efisien Peningkatan realisasi biaya untuk mendapatkan pendapatan yang maksimum telah terbukti. Rasio efisiensi dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan cukup kecil sehingga ini dikategorikan sangat efisien sehingga kinerja dinilai sangat baik	Perspektif efisiensi proses internal Dihimpun dari respon pegawai pemerintah tentang aparat yang menjalankan aktivitas pemerintahan. Efektivitas dari pelaksanaan pemerintahan dari sudut pandang pegawai mencapai kisaran 81% yang tergolong pada sangat efektif. Namun begitu, dari dua belas pernyataan, satu pernyataan memperoleh skor dengan kategori tidak efektif yaitu pada penyampaian laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, namun begitu secara menyeluruh semuanya efektif yang berarti kinerja pemerintah juga sangat baik
3	Efektivitas Tingkat efektivitas dari tahun 2014 hingga 2015 stabil dikisaran 100% ke atas dengan prediket sangat efektif dan ini menjelaskan kinerja yang sangat baik. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan hingga menyentuh persentase 95% yang disebabkan oleh turunnya capaian dari PAD yang di anggarkan terlalu besar. Namun masih	Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Responden di ambil dari pegawai pemerintahan dengan menyediakan sebelas pernyataan terkait dengan pembelajaran dan pertumbuhan.. efektivitas yang didapatkan dari hal ini yaitu pada kisaran 72% dengan kategori cukup efektif. Pencapaian ini di dominasi oleh kategori cukup efektif sebanyak 9 pernyataan dan 2 pernyataan dengan kategori sangat efektif. Pada kondisi ini kinerja pemerintah dinyatakan cukup baik

dalam kategori efektif sehingga secara menyeluruh efektivitas tinggi dan kinerja pemerintah baik	
--	--

Baiknya tingkat keekonomisan pemerintah dalam pengadaan dan alokasi sumber daya telah meningkatkan keefisienan dari pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan dengan berdaya guna dan memenuhi sasaran serta tujuan yang akan dicapai. Baiknya keekonomisan diharapkan mampu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat pada wilayah pemerintahan terutama terkait pelayanan dan kemudahan akses dalam menikmati sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sedikitnya biaya yang dikeluarkan dari yang dianggarkan, untuk memperoleh pendapatan yang lebih dari yang diestimasi sebelumnya, akan menjadikan pemerintah lebih baik dalam hal mengelola keuangan. Keuangan yang dikelola nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dan pelaksanaan semua aktivitas dari apa yang dianggarkan dapat kita buktikan dari efektivitas yang tinggi. Efektivitas yang tinggi berarti pemerintah mampu melaksanakan apa yang diprogramkan dengan sukses. Kesuksesan ini akan diikuti dengan sejahteranya masyarakat dan tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan pemerintah. Hubungan kinerja yang dinilai secara finansial akan berdampak kepada kinerja yang dinilai secara non finansial. Secara finansial pemerintah memberikan pertanggung jawaban yang jelas dan nyata untuk masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat serta pelayanan pemerintahpun akan semakin membaik sehingga masyarakat merasa puas dengan pemerintahan sekarang. Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi dalam pembahasan ini. Tingginya kinerja pemerintah disegi finansial tidak menjamin masyarakat akan merasa puas dengan apa yang dilakukan pemerintah.

Bukti langsung yang nyata diberikan pemerintah dalam upaya peningkatan kepuasan masyarakat dapat disimpulkan

sudah efektif, keandalan pemerintahpun dinilai dengan kategori efektif oleh masyarakat dan jaminan yang ditawarkan pemerintah juga mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat. Akan tetapi empati dan daya tanggap masyarakat tidak dapat memuaskan masyarakat atas pemerintahan sekarang. Secara keuangan efektivitas pemerintah memang tinggi namun efektivitas tidak hanya mencakup keuangan tetapi juga berhasil-guna yang berarti sasaran dari program mesti dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Artinya pemerintah harus mampu untuk sigap dengan keluhan masyarakat dan lebih memerhatikan keinginan masyarakat agar dapat meningkatkan bukti nyata kinerja dimata masyarakat.

Selanjutnya, sangat ekonomis, sangat efisien dan efektif, dilihat dari sudut pandang perspektif proses internal pemerintah dan pertumbuhan serta pembelajaran dapat dikatakan sinkron. Maksudnya meningkatnya ketiga hal tersebut dapat menciptakan efisiensi proses internal yang efektif bagi pegawai pemerintahan. Ekonomis menjadikan dana yang tersedia lebih banyak untuk dimanfaatkan pegawai dalam menciptakan proses internal yang baik. Ini sejalan dengan peningkatan efisiensi yang menyebabkan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan pengeluaran yang seoptimalnya. Tercapainya hal ini menjadikan tujuan program dapat terpenuhi dan bernilai guna bagi peningkatan pelayan masyarakat oleh pegawai pemerintahan yang semakin baik dalam pekerjaannya. Hal tersebut juga dirasakan pegawai dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang disediakan pemerintah untuk menjadikan pegawai tersebut lebih kompeten dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja secara finansial lebih berefek pada perspektif efisiensi proses internal dan juga pembelajaran serta pertumbuhan daripada perspektif kepuasan masyarakat karena kinerja finansial belum mampu menyamakan persepsi masyarakat atas terlaksananya kinerja pemerintahan yang baik.

5. Kesimpulan dan saran

5.1 Kesimpulan

Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan aspek finansial pada kota Solok dikategorikan baik karena pada tingkatan nilai ekonomis yang dicapai tergolong sangat baik, nilai efisiensi rendah yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah untuk mengelola biaya juga sangat baik dan juga tingkat efektivitas yang tinggi mencerminkan kinerja pemerintah yang tinggi dengan tercapainya semua yang dianggarkan.

Namun berbeda halnya dari aspek finansial, aspek non finansial pada Kota Solok cenderung lemah. Rendahnya perhatian dan daya tanggap pemerintah terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat menjadikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan menjadi rendah. Di sisi lain dari aparatur pemerintahan memperlihatkan hasil yang cukup efektif hanya saja kalau digabungkan dengan masyarakat maka tetap hasil dari kinerja pemerintah kurang baik karena lebih cenderung kearah ketidakpuasan.

Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja yang ditunjukkan informasi finansial tidak dipengaruhi oleh informasi non finansial.

5.2 Saran

Penelitian ini masih terbatas kepada satu SKPD sehingga hasil yang didapatkan belumlah maksimal, jadi untuk peneliti berikutnya diharapkan mampu memperluas cakupan penelitian.

Saran untuk pemerintah, mulailah untuk lebih memperhatikan keinginan masyarakat dan laksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Bastian, Indra, (2005). Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Erlangga. Jakarta.

Bisma, I Gde Dewa dan Hery Susanto (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. GaneC Swara Edisi Khusus Vol.4 No. 3, Desember 2010.

D A A Ratih Iswari.(2011). Penilaian Kinerja Aspek Finansial Dan Non-Finansial Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Jurnal : Universitas Udayana.

Departemen Dalam Negeri. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta.

_____. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta. Deddi dan Ayuningtyas, (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

H.S. Lindo, D.P.E Saerang, I. Elim (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money. Jurnal EMBA:Vol.2 No. 3 September 2014, Hal. 1686-1694

Halim, Abdul, 2001. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat: Jakarta.

Harun, (2008). Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

I.D.M.I. Purnamasari, I Wayan Suwendra, Wayan Cipta (2014). Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value for Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Manajemen Vol. 2 Tahun 2014. Singaraja.

Julita dan Jufrizen, (2012). Budgeting. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Bandung.

Kaplan, Robert S and David P Norton, 1996. Balanced Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, Erlangga : Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta

Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Edisi ke-1. Yogyakarta: BPF.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press
- Pangkey, Imanuel dan Sherly Pinatik. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No 4 Desember 2014, hal. 33-43
- Prakoso, (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rizal Efendi (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik dengan Menggunakan Balanced Scorecard (Studi Kasus Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel). *Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP* Vol. 1 No. 2 Maret 2012. Palembang.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Tjiptono, Fauzi. 2000. *Prinsip-Prinsip Total Quality Services*. Jakarta : Andi
- Trisna Dewi. 2005. *Balanced Scorecard sebagai Alat Pengukuran Kinerja pada PDAM kota Denpasar*. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
- Wardika, I Gusti Agung Made. 2004. *Kinerja Puskesmas di Kabupaten Badung*. Tesis Magister Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar
- Wiratna Sujarweni, 2015, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Pustaka Baru Press Yogyakarta.
- Yunianti, Umi (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (2015). Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.
- Wahyudin Nor (2012). Penerapan Balanced Scorecard Pada Pemerintah Daerah. *AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol.7, No. 2, Juli 2012

Halaman ini sengaja dikosongkan